



Sacred Authority and Silent Violence: Theological Capital and the Symbolic Production of Sexual Abuse in Pesantren

Sugeng Riyadi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sugenkriyadi1999@gmail.com

Abstract: This article examines how religious authority operates through symbolic mechanisms to produce and sustain the subordination of female students in an Indonesian *pesantren* (Islamic boarding school). Drawing on Pierre Bourdieu's concepts of field, habitus, symbolic capital, symbolic power, symbolic violence, *doxa*, and *misrecognition*, the study investigates a case of sexual violence involving female students in a pesantren in East Java. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with victims, victim advocates, and pesantren administrators, supported by documentary sources. The findings reveal that the *kyai's* religious legitimacy functions as symbolic capital that generates obedience through the culture of *ta'dzim*, reverence for religious authority, and the pursuit of blessed knowledge. These dispositions are internalized as a patriarchal habitus that normalizes unequal gender relations and limits victims' capacity to resist or report abuse. The study argues that sexual violence in pesantren should be understood not merely as individual misconduct but as a manifestation of symbolic domination embedded within religious authority and patriarchal social structures.

Keywords: Pesantren, Religious Authority, Symbolic Power, Symbolic Violence, Patriarchal Habitus, Pierre Bourdieu

Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana otoritas keagamaan bekerja melalui mekanisme simbolik dalam membentuk dan mempertahankan subordinasi santriwati di sebuah pesantren di Indonesia. Dengan menggunakan konsep arena, habitus, modal simbolik, kekuasaan simbolik, kekerasan simbolik, *doxa*, dan *misrecognition* dari Pierre Bourdieu, penelitian ini menganalisis kasus kekerasan seksual yang melibatkan santriwati di sebuah pesantren di Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap korban, pendamping korban, dan pengurus pesantren, yang didukung oleh berbagai dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan yang dimiliki kyai berfungsi sebagai modal simbolik yang

menghasilkan kepatuhan melalui budaya *ta'dzim*, penghormatan terhadap otoritas keagamaan, serta keyakinan akan pentingnya keberkahan ilmu. Disposisi tersebut terinternalisasi menjadi habitus patriarkal yang menormalisasi relasi gender yang tidak setara dan membatasi kemampuan korban untuk menolak maupun melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Penelitian ini berargumen bahwa kekerasan seksual di pesantren tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku menyimpang individu, melainkan sebagai manifestasi dominasi simbolik yang berakar pada otoritas keagamaan dan struktur sosial patriarkal yang bekerja dalam kehidupan pesantren.

Kata Kunci: Pesantren, Otoritas Keagamaan, Kekuasaan Simbolik, Kekerasan Simbolik, Habitus Patriarkal, Pierre Bourdieu.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi salah satu isu yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat, media, maupun kalangan akademik di Indonesia. Fenomena tersebut memunculkan kegelisahan publik karena terjadi di lembaga yang selama ini dipersepsikan sebagai ruang pembentukan moral, spiritualitas, dan pendidikan keagamaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pesantren bukan merupakan peristiwa yang sepenuhnya terisolasi, melainkan berkaitan dengan relasi sosial yang berkembang dalam lingkungan pendidikan keagamaan itu sendiri. Studi Pebriaisyah, Wilodati, dan Komariah menemukan bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang antara kyai dan santri dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap santri perempuan, terutama ketika otoritas keagamaan memperoleh legitimasi yang sangat kuat dalam kehidupan pesantren.¹ Temuan serupa juga dikemukakan oleh Yamani, Gunawan, dan Fedryansyah yang menunjukkan bahwa konstruksi sosial dalam lingkungan pesantren dapat membentuk situasi yang menyulitkan korban untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya.² Dalam konteks tersebut, kekerasan seksual tidak

¹ Bz Fitri Pebriaisyah, Wilodati Wilodati, and Siti Komariah, 'Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren', *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 1 (June 2022): 1–14, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>.

² Ulfah Karimah Yamani, Wahyu Gunawan, and Muhammad Fedryansyah, 'Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Pada Anak Di Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung', *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 3 (September 2023): 3, <https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1128>.

dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individual pelaku, tetapi perlu dilihat sebagai fenomena sosial yang berhubungan dengan struktur kekuasaan yang bekerja dalam institusi keagamaan.

Pesantren sendiri merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Keberadaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu keislaman, tetapi juga sebagai arena pembentukan nilai, identitas, dan otoritas keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dhofier menjelaskan bahwa figur kyai menempati posisi sentral dalam struktur sosial pesantren karena dipandang sebagai sumber pengetahuan agama sekaligus pemimpin moral yang memperoleh penghormatan tinggi dari para santri dan masyarakat.³ Posisi tersebut diperkuat oleh berbagai bentuk legitimasi sosial yang menjadikan kyai sebagai figur otoritatif dalam pengambilan keputusan maupun pembentukan norma di lingkungan pesantren. Kajian Syafiqurrahman dan Hosnan menunjukkan bahwa kepemimpinan kyai tidak hanya didasarkan pada kewenangan administratif, tetapi juga pada modal simbolik yang bersumber dari pengakuan sosial dan religius masyarakat.⁴ Dengan demikian, pesantren tidak hanya dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan, melainkan juga sebagai arena sosial tempat berbagai bentuk kekuasaan, legitimasi, dan relasi otoritas diproduksi serta direproduksi secara berkelanjutan.

Tingginya legitimasi sosial yang dimiliki pesantren pada satu sisi menjadikannya sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun pada sisi lain, kemunculan sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menghadirkan paradoks yang menantang asumsi mengenai institusi keagamaan sebagai ruang yang sepenuhnya aman dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Kasus yang terjadi di berbagai pesantren menunjukkan bahwa pelaku sering kali merupakan figur yang memiliki kedudukan sosial, keagamaan, maupun kelembagaan yang tinggi sehingga memperoleh kepercayaan luas dari

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Cet. 8 rev (LP3ES, 2011), <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971149384762836125>.

⁴ Syafiqurrahman Syafiqurrahman and Mohammad Hosnan, 'Kepemimpinan Kiai: (Analisis Modalitas Kepemimpinan Kiai Kampung Dalam Tradisi Kompolan)', *Tafhim Al-Ilmi* 10, no. 2 (May 2019): 17–41, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i2.3422>.

masyarakat.⁵ Dalam konteks ini, kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga mengguncang legitimasi moral lembaga keagamaan yang selama ini menjadi rujukan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban kerap mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pengalaman yang dialaminya karena berhadapan dengan figur yang dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam lingkungan sosialnya.⁶ Situasi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada tindakan kekerasan itu sendiri, melainkan juga pada struktur relasi sosial yang memungkinkan tindakan tersebut berlangsung dan sulit dipersoalkan oleh pihak yang berada pada posisi subordinat.

Meskipun penelitian mengenai kekerasan seksual di pesantren terus berkembang, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek perlindungan anak, dampak psikologis korban, kebijakan pencegahan, maupun respons hukum terhadap pelaku.⁷ Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konsekuensi kekerasan seksual serta upaya penanganannya, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana relasi kuasa yang bekerja dalam institusi keagamaan dapat membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan tersebut. Kajian Zahra dan Rofi'ah, misalnya, menunjukkan bahwa pengalaman pelecehan seksual memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan santri terhadap lingkungan belajar mereka.⁸ Namun demikian, masih diperlukan penjelasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme sosial yang menyebabkan korban sulit melakukan perlawanan, mempertanyakan otoritas pelaku, atau mengakses saluran pengaduan yang aman. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk menggeser fokus analisis dari pertanyaan mengenai apa yang terjadi kepada korban menuju pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana

⁵ Destyan H. Sujarwoko, 'Bapak-Anak Pengasuh Ponpes Yang Cabuli Santri Dituntut Maksimal - ANTARA News Jawa Timur', Antara News, accessed 6 June 2026, <https://jatim.antaranews.com/berita/820447/bapak-anak-pengasuh-ponpes-yang-cabuli-santri-dituntut-maksimal>.

⁶ Pebriaisyah, Wilodati, and Komariah, 'Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan'.

⁷ M. Rifa Baihaqi et al., 'Analisis Swot Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren', *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 19, no. 2 (2023): 181–91, <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v19i2.591>.

⁸ Roseta Al Zahra and Rofi'ah, 'Hubungan Antara Pengalaman Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren Dan Tingkat Kepercayaan Santri Terhadap Lingkungan Belajar', *DEWANTECH Jurnal Teknologi Pendidikan* 2, no. 1 (March 2024): 1, <https://doi.org/10.61434/dewantech.v2i1.65>.

struktur kekuasaan dalam pesantren bekerja dan direproduksi sehingga mampu mempertahankan ketimpangan relasi antara pelaku dan korban.

Dalam berbagai institusi keagamaan, otoritas tidak hanya dibangun melalui aturan formal, tetapi juga melalui pengakuan sosial yang menjadikan individu tertentu memiliki kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan cara berpikir orang lain. Relasi kuasa semacam ini sering kali bekerja secara halus karena didasarkan pada legitimasi yang diterima secara sukarela oleh anggota komunitas. Dalam konteks pesantren, kyai tidak sekadar diposisikan sebagai pengajar agama, melainkan sebagai figur yang dipercaya memiliki keunggulan moral, spiritual, dan intelektual yang layak dijadikan rujukan dalam berbagai aspek kehidupan.⁹ Posisi tersebut diperkuat oleh budaya penghormatan terhadap guru yang diwariskan melalui tradisi kepesantrenan dan ditanamkan sejak awal proses pendidikan santri.¹⁰ Akibatnya, hubungan antara kyai dan santri tidak berlangsung dalam posisi yang sepenuhnya setara, melainkan berada dalam struktur hierarkis yang menempatkan kyai sebagai pemegang otoritas utama. Dalam kondisi tertentu, legitimasi yang sangat kuat ini dapat menghasilkan relasi kuasa yang sulit dipertanyakan karena telah menyatu dengan nilai-nilai religius dan moral yang diyakini bersama oleh komunitas pesantren.

Untuk memahami bagaimana relasi kuasa tersebut bekerja, artikel ini menggunakan perspektif Pierre Bourdieu yang menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak selalu beroperasi melalui paksaan fisik atau dominasi terbuka. Menurut Bourdieu, dominasi dapat berlangsung secara efektif melalui mekanisme simbolik yang membuat individu menerima suatu tatanan sosial sebagai sesuatu yang wajar dan sah.¹¹ Dalam kerangka ini, kekuasaan simbolik bekerja ketika pihak yang didominasi ikut mengakui legitimasi pihak yang mendominasi sehingga relasi kuasa tidak tampak sebagai bentuk penindasan yang nyata. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa konsep modal simbolik, habitus, dan kekerasan simbolik Bourdieu relevan untuk menjelaskan bagaimana legitimasi sosial dapat digunakan untuk

⁹ Dhofier, *Tradisi Pesantren*.

¹⁰ 'Ta'lim Muta'allim: Solutions for Forming the Ta'dzim Attitude of Generation Z Students towards Teachers | Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman', accessed 6 June 2026, <https://pondokjurnal.uwj.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo/article/view/1334>.

¹¹ Eka Ningtyas, *Pierre Bourdieu, Language And Symbolic Power*, III, no. 2 (2015): 154–57.

mempertahankan dominasi dalam berbagai arena sosial.¹² Oleh karena itu, pendekatan Bourdieusian menawarkan perangkat analitis yang penting untuk memahami bagaimana otoritas keagamaan dalam pesantren tidak hanya menghasilkan kepatuhan, tetapi juga membentuk kondisi sosial yang memungkinkan relasi dominasi diterima, direproduksi, dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain beroperasi melalui otoritas keagamaan, relasi dominasi dalam pesantren juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan struktur patriarki yang membentuk pembagian peran dan posisi sosial berdasarkan jenis kelamin. Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam berbagai arena kehidupan, termasuk keluarga, pendidikan, agama, dan politik.¹³ Dalam lingkungan pesantren, struktur tersebut tampak melalui dominasi laki-laki dalam posisi kepemimpinan, produksi wacana keagamaan, maupun pengambilan keputusan kelembagaan. Penelitian Marhumah menunjukkan bahwa konstruksi gender dalam pesantren sering kali dipengaruhi oleh interpretasi keagamaan dan tradisi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih subordinat dibandingkan laki-laki.¹⁴ Situasi ini tidak selalu hadir dalam bentuk pembatasan yang eksplisit, tetapi sering kali bekerja melalui proses sosialisasi yang membentuk cara pandang mengenai peran yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Akibatnya, ketimpangan gender dapat diterima sebagai sesuatu yang alamiah dan tidak dipersoalkan, bahkan oleh kelompok yang berada dalam posisi yang dirugikan oleh struktur tersebut. Dalam konteks kekerasan seksual, kondisi ini menciptakan kerentanan tambahan bagi santriwati karena mereka berhadapan dengan figur laki-laki yang tidak hanya memiliki otoritas keagamaan, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang kuat sebagai pemimpin pesantren.

Dalam perspektif Bourdieu, penerimaan terhadap relasi dominasi semacam itu dapat dijelaskan melalui konsep *doxa* dan *misrecognition*, yaitu kondisi ketika suatu tatanan sosial diterima sebagai kebenaran yang wajar sehingga mekanisme dominasi yang terkandung di dalamnya tidak lagi

¹² Nur Ika Fatmawati and Ahmad Sholikin, 'Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik', *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.3280>.

¹³ Sylvia Walby, 'Theorising Patriarchy', *Sociology* 23, no. 2 (May 1989): 213–34, <https://doi.org/10.1177/0038038589023002004>.

¹⁴ Dr Ema Marhumah, *KONSTRUKSI SOSIAL GENDER DI PESANTREN ; Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan* (Lkis Pelangi Aksara, 2011).

dikenali sebagai bentuk kekuasaan.¹⁵ Berangkat dari kerangka tersebut, artikel ini berargumen bahwa kekerasan seksual terhadap santriwati di pesantren tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan perilaku individu, melainkan sebagai manifestasi dari dominasi simbolik yang bekerja melalui kombinasi antara modal simbolik kyai, budaya kepatuhan, dan reproduksi habitus patriarkal dalam arena pesantren. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek hukum, perlindungan korban, atau dampak psikologis kekerasan seksual, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana struktur dominasi tersebut diproduksi, dipertahankan, dan dinormalisasi dalam kehidupan pesantren sehari-hari. Dengan menggunakan studi kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pesantren di Jawa Timur, artikel ini berusaha memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi Islam dengan menunjukkan bagaimana otoritas keagamaan dapat bertransformasi menjadi mekanisme dominasi simbolik yang menopang subordinasi perempuan dalam institusi pendidikan keagamaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami bagaimana kekuasaan simbolik, habitus patriarkal, dan relasi dominasi bekerja dalam kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pesantren di Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengungkap makna, pengalaman, serta relasi sosial yang membentuk terjadinya kekerasan seksual dalam konteks kehidupan pesantren. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada peristiwa kekerasan itu sendiri, tetapi juga pada struktur sosial dan budaya yang memungkinkan kekerasan tersebut berlangsung.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban, pendamping korban, pengurus pesantren, serta orang tua korban. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kasus yang diteliti.¹⁶ Untuk memperkuat validitas data, hasil wawancara juga dilengkapi dengan analisis dokumen berupa putusan pengadilan, pemberitaan media, dan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kombinasi antara data wawancara dan data

¹⁵ Ningtyas, *Pierre Bourdieu, Language And Symbolic Power*.

¹⁶ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (SAGE, 2013).

dokumenter memungkinkan peneliti memahami baik pengalaman subjektif korban maupun konteks sosial yang melingkupi terjadinya kekerasan seksual.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data dianalisis menggunakan perspektif teori sosial Pierre Bourdieu, khususnya konsep arena, habitus, modal simbolik, kekuasaan simbolik, kekerasan simbolik, doxa, dan misrecognition. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai perangkat analitis untuk menjelaskan bagaimana dominasi tidak hanya bekerja melalui paksaan langsung, tetapi juga melalui mekanisme simbolik yang diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, kekerasan seksual dipahami bukan sekadar sebagai tindakan individual pelaku, melainkan sebagai bagian dari relasi kuasa yang tertanam dalam struktur sosial dan budaya pesantren.¹⁷

Otoritas Simbolik Kyai dan Produksi Kepatuhan Santri

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah kuatnya sentralitas figur kyai dalam struktur sosial pesantren. Berdasarkan wawancara dengan pengurus pesantren, lembaga yang diteliti berkembang melalui pola kepemimpinan tradisional yang menempatkan kyai sebagai pusat otoritas utama. Meskipun terdapat ustaz dan pengurus yang membantu menjalankan kegiatan pendidikan sehari-hari, keputusan strategis tetap berada di tangan kyai. Informan menjelaskan bahwa sistem organisasi pesantren tidak dibangun melalui mekanisme birokratis sebagaimana lembaga pendidikan formal modern, melainkan bertumpu pada legitimasi personal dan kepemimpinan kyai sebagai pendiri sekaligus pengasuh pesantren. Ketika diminta menjelaskan karakter kepemimpinan tersebut, informan menyatakan bahwa “ciri khas pesantren itu kiai-sentris. Otoritas kiai agak sulit ditembus.”¹⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa posisi kyai tidak hanya berada pada puncak struktur organisasi, tetapi juga menempati posisi dominan dalam keseluruhan arena sosial pesantren. Dalam kondisi demikian, hubungan antara kyai dan warga pesantren tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga dibentuk oleh relasi moral, spiritual, dan simbolik yang kuat.¹⁹

¹⁷ Creswell.

¹⁸ Informan Pengurus Pondok, ‘Struktur Pesantren’, 3 June 2026, Polres Trenggalek.

¹⁹ Haerussaleh Haerussaleh and Nuril Huda, ‘Modal Sosial, Kultural, dan Simbolik Sebagai Representasi Pelanggaran Kekuasaan dalam Novel The President Karya Mohammad

Dominasi posisi kyai semakin terlihat dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan pesantren. Informan menjelaskan bahwa perbedaan pendapat antara pengurus dan kyai dapat terjadi dalam berbagai persoalan kelembagaan. Namun dalam praktiknya, keputusan akhir tetap berada di tangan kyai dan umumnya diterima oleh seluruh unsur pesantren. Pengurus bahkan menceritakan pengalamannya ketika pernah tidak sependapat dengan rencana pembukaan jenjang pendidikan tertentu. Meskipun telah menyampaikan keberatannya, ia tetap mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh kyai. Menariknya, sikap tersebut tidak dipahami sebagai bentuk keterpaksaan, melainkan sebagai bagian dari penghormatan kepada guru dan pemimpin pesantren.²⁰ Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap kyai tidak dibangun melalui mekanisme koersif ataupun ancaman formal, tetapi melalui penerimaan sosial yang telah mengakar dalam kehidupan pesantren. Dengan kata lain, otoritas kyai memperoleh kekuatan justru karena diakui dan diterima oleh mereka yang berada di bawahnya.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi tersebut menunjukkan bekerjanya modal simbolik dalam arena pesantren.²¹ Modal simbolik merujuk pada bentuk pengakuan sosial yang menghasilkan legitimasi, kehormatan, dan kewibawaan di mata kelompok sosial tertentu. Berbeda dengan modal ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan materi, modal simbolik bekerja melalui kepercayaan dan pengakuan kolektif. Dalam kasus ini, posisi kyai memperoleh legitimasi dari berbagai sumber sekaligus, seperti penguasaan ilmu agama, status sebagai pendiri pesantren, reputasi moral di masyarakat, serta kedudukannya sebagai figur yang dianggap memiliki otoritas spiritual.²² Kombinasi berbagai sumber legitimasi tersebut menjadikan kyai tidak sekadar pemimpin administratif, melainkan figur yang memiliki kewibawaan simbolik yang sangat kuat. Karena itu, keputusan yang diambil oleh kyai sering kali diterima sebagai sesuatu yang sewajarnya tanpa memerlukan pembenaran yang panjang.

Sobary (Kajian Pierre Bourdieu)', *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua* 6, no. 1 (May 2021): 19–28, <https://doi.org/10.21107/metalingua.v6i1.10032>.

²⁰ Informan Pengurus Pondok, 'Budaya Kepatuhan', 3 June 2026, Polres Trenggalek.

²¹ Haerussaleh and Huda, 'Modal Sosial, Kultural, dan Simbolik Sebagai Representasi Pelanggaran Kekuasaan dalam Novel The President Karya Mohammad Sobary (Kajian Pierre Bourdieu)', 19–28.

²² Syafiqurrahman and Hosnan, 'Kepemimpinan Kiai'. 17–41

Kuatnya modal simbolik kyai tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan yang berlangsung dalam kehidupan pesantren.²³ Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai utama yang ditanamkan kepada santri meliputi penghormatan kepada guru, kepatuhan terhadap guru, menjaga adab, bersikap tawaduk, serta mengutamakan keberkahan ilmu. Menurut informan, keberhasilan pendidikan pesantren tidak hanya diukur dari kemampuan memahami ilmu agama, tetapi juga dari kualitas sikap santri terhadap guru. Dalam konteks ini, penghormatan kepada guru bukan sekadar norma sosial, melainkan bagian dari identitas moral seorang santri. Bahkan informan menegaskan bahwa “indikator keberhasilan santri sering kali dilihat dari tawaduknya kepada guru.”²⁴ Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan kepada guru telah ditempatkan sebagai nilai pendidikan yang fundamental dalam kehidupan pesantren.

Proses internalisasi nilai tersebut berlangsung melalui berbagai mekanisme pendidikan, salah satunya melalui pembelajaran kitab *Ta'lim al-Muta'allim*.²⁵ Informan menjelaskan bahwa kitab tersebut mengajarkan pentingnya menghormati guru sebagai syarat memperoleh manfaat dan keberkahan ilmu. Dalam tradisi pesantren, keberkahan ilmu merupakan konsep yang sangat penting karena dipahami sebagai faktor yang menentukan kemanfaatan ilmu dalam kehidupan seseorang. Akibatnya, penghormatan kepada guru tidak hanya dipahami sebagai etika sosial, tetapi juga sebagai praktik religius yang diyakini memiliki konsekuensi spiritual. Melalui proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus, nilai-nilai tersebut kemudian membentuk cara pandang santri terhadap hubungan antara murid dan guru. Seiring waktu, penghormatan kepada kyai tidak lagi dipandang sebagai kewajiban eksternal, melainkan menjadi bagian dari kesadaran internal yang membimbing perilaku sehari-hari para santri.

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, proses tersebut dapat dipahami sebagai pembentukan habitus.²⁶ Habitus merupakan seperangkat disposisi yang tertanam dalam diri individu melalui pengalaman sosial yang berlangsung berulang kali. Habitus membuat individu bertindak, berpikir, dan merasakan sesuatu secara spontan sesuai dengan pola yang telah

²³ Syafiqurrahman and Hosnan. 17-41

²⁴ Pengurus Pondok, 'Budaya Kepatuhan'.

²⁵ 'Ta'lim Muta'allim: Solutions for Forming the Ta'dzim Attitude of Generation Z Students towards Teachers | Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman'.

²⁶ Pierre Bourdieu, 'Habitus', in *Habitus: A Sense of Place*, 2nd ed. (Routledge, 2005). 107

diinternalisasi sebelumnya. Dalam konteks pesantren, penghormatan kepada kyai tidak perlu dipaksakan melalui aturan yang kaku karena telah menjadi bagian dari habitus santri. Mereka belajar untuk menghormati, menaati, dan mematuhi figur guru melalui berbagai praktik keseharian yang terus direproduksi dalam kehidupan pesantren. Akibatnya, kepatuhan terhadap kyai tidak lagi dipahami sebagai bentuk relasi kuasa, melainkan sebagai sesuatu yang alamiah dan seharusnya dilakukan oleh setiap santri.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa budaya penghormatan yang kuat tersebut secara tidak langsung membatasi ruang kritik terhadap figur otoritas. Ketika ditanya mengenai kemungkinan santri atau pengurus mengkritik keputusan pengasuh pesantren, informan menjelaskan bahwa secara formal tidak terdapat larangan untuk menyampaikan pendapat. Namun dalam praktiknya, budaya penghormatan yang sangat kuat membuat santri maupun pengurus cenderung enggan menyampaikan kritik secara terbuka. Informan mengakui bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, sikap yang lebih umum dilakukan adalah menerima keputusan kyai atau memilih diam. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa dominasi simbolik tidak memerlukan larangan eksplisit untuk membatasi kritik. Batasan tersebut bekerja melalui kesadaran sosial yang telah terbentuk sebelumnya sehingga individu secara sukarela menyesuaikan diri dengan struktur yang ada.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa kepatuhan santri bukanlah sesuatu yang muncul secara alami, melainkan diproduksi melalui proses sosial yang panjang. Arena pesantren yang bersifat kiai-sentris, kepemilikan modal simbolik yang besar oleh kyai, internalisasi nilai ta'dzim melalui pendidikan, serta pembentukan habitus penghormatan kepada guru saling berinteraksi dalam menghasilkan kepatuhan yang kuat. Dalam kondisi demikian, kyai memiliki kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan cara berpikir santri tanpa harus menggunakan paksaan langsung. Inilah yang oleh Bourdieu disebut sebagai kekuasaan simbolik,²⁷ yaitu kemampuan untuk memperoleh kepatuhan melalui legitimasi dan pengakuan sosial. Kekuasaan simbolik tersebut menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana relasi yang tidak seimbang antara kyai dan santriwati dapat terbentuk. Dari titik inilah pembahasan mengenai kekerasan simbolik dan pembungkaman korban perlu dilanjutkan, karena dominasi yang

²⁷ Moch. Hasan Hafani and Muhammad Nahidh Buldani, 'Patriarki dan Kekuasaan: Bagaimana Laki-Laki Mengendalikan Kehidupan dalam Keluarga', *ASA* 7, no. 1 (February 2025): 1–12, <https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.120>.

sebelumnya diterima sebagai bentuk penghormatan dapat berkembang menjadi mekanisme yang membatasi kemampuan korban untuk menolak, melawan, atau melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Kekerasan Simbolik dan Pembungkaman Korban

Dalam dinamika kehidupan pesantren, relasi kuasa yang terbentuk melalui otoritas simbolik kyai tampak tidak hanya berfungsi dalam membangun kepatuhan santri terhadap struktur yang ada, tetapi juga turut memengaruhi cara korban memaknai dan merespons pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya. Berbagai keterangan yang diperoleh dari korban maupun pendamping korban menunjukkan bahwa persoalan yang paling sering muncul bukan terletak pada ketidakmampuan korban mengenali adanya tindakan yang tidak semestinya, melainkan pada beratnya proses untuk mengungkapkan pengalaman tersebut kepada pihak lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengaruh relasi kuasa yang telah mengakar dalam lingkungan pesantren dapat membentuk hambatan psikologis dan sosial yang membuat korban cenderung memilih diam atau menunda pelaporan atas kekerasan yang dialaminya. Dalam banyak kasus, korban menyadari bahwa tindakan yang dilakukan pelaku menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan. Namun kesadaran tersebut tidak secara otomatis mendorong mereka untuk melakukan penolakan ataupun pelaporan. Sebaliknya, korban justru mengalami kebingungan mengenai bagaimana harus bersikap ketika tindakan tersebut dilakukan oleh figur yang selama ini ditempatkan sebagai tokoh agama yang dihormati dan dipercaya.

Salah seorang korban menjelaskan bahwa dirinya merasa bingung ketika pertama kali mengalami perlakuan yang dianggap tidak wajar.²⁸ Di satu sisi ia merasakan ketidaknyamanan, tetapi di sisi lain pelaku merupakan figur yang selama ini diajarkan untuk dihormati. Situasi tersebut membuat korban mengalami konflik batin antara keinginan untuk menolak dan kewajiban moral yang selama ini ditanamkan dalam kehidupan pesantren. Pengalaman ini menunjukkan bahwa relasi antara pelaku dan korban tidak berlangsung dalam posisi yang setara. Korban tidak berhadapan dengan individu biasa, melainkan dengan seseorang yang memiliki legitimasi keagamaan, sosial, dan kelembagaan sekaligus. Ketimpangan posisi tersebut menyebabkan kemampuan korban untuk melakukan penolakan menjadi jauh lebih terbatas

²⁸ Informan Korban 1, 'Pengalaman Dominasi', 3 June 2026, Polres Trenggalek.

dibandingkan apabila relasi yang terjadi berlangsung dalam kondisi yang setara.

Pendamping korban menjelaskan bahwa ketika proses pendampingan dimulai, sebagian korban menunjukkan kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa takut, bingung, dan ketidakpastian. Menurutnya, korban sebenarnya memiliki keinginan untuk menceritakan pengalaman yang dialami, tetapi mereka tidak yakin apakah kesaksiannya akan dipercaya oleh lingkungan sekitar. Dalam proses wawancara, korban berulang kali mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengakuan mereka akan dianggap sebagai bentuk fitnah terhadap tokoh agama yang selama ini dihormati masyarakat. Kekhawatiran tersebut bahkan lebih dominan dibandingkan ketakutan terhadap ancaman langsung dari pelaku.²⁹ Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi korban tidak berasal dari kekerasan fisik, melainkan dari tekanan sosial yang muncul akibat posisi simbolik pelaku dalam masyarakat.

Temuan tersebut menjadi menarik karena berbeda dengan asumsi yang sering muncul dalam berbagai pembahasan mengenai relasi kyai dan santri. Secara umum terdapat anggapan bahwa korban enggan melapor karena takut dianggap durhaka kepada guru atau takut memperoleh konsekuensi religius tertentu.³⁰ Akan tetapi, data penelitian menunjukkan bahwa faktor tersebut bukanlah alasan yang paling dominan. Korban justru lebih banyak menyampaikan ketakutan bahwa masyarakat tidak akan mempercayai kesaksiannya. Mereka khawatir dicap sebagai pembohong, dianggap merusak nama baik pesantren, atau dituduh menjatuhkan reputasi tokoh agama yang dihormati. Dengan demikian, hambatan utama bagi korban ternyata lebih bersifat sosial daripada teologis.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, situasi tersebut menunjukkan bekerjanya kekerasan simbolik (*symbolic violence*).³¹ Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan simbolik merupakan bentuk dominasi yang tidak dijalankan melalui paksaan fisik, melainkan melalui pengakuan terhadap legitimasi pihak yang mendominasi. Kekerasan simbolik menjadi efektif ketika pihak yang didominasi menerima atau setidaknya sulit menolak struktur kuasa yang sedang berlangsung. Dalam kasus ini, posisi kyai sebagai pemegang modal simbolik yang besar menyebabkan korban mengalami kesulitan untuk mempersoalkan tindakan yang dilakukan pelaku. Dominasi tidak muncul

²⁹ Informan Pendamping Korban, 'Kondisi Korban', 3 June 2026, Polres Trenggalek.

³⁰ Informan Korban 2, 'Relasi Dengan Kyai', 3 June 2026, Polres Trenggalek.

³¹ Fatmawati and Sholikin, 'Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik'.

dalam bentuk ancaman terbuka, tetapi bekerja melalui keyakinan sosial bahwa figur tertentu memiliki kewibawaan yang tidak mudah dipertanyakan. Akibatnya, korban menghadapi hambatan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar ketakutan terhadap pelaku sebagai individu.

Bentuk lain dari kekerasan simbolik terlihat pada proses pembungkaman yang berlangsung setelah kasus mulai diketahui oleh lingkungan sekitar. Berdasarkan keterangan pendamping korban, sebagian korban mengalami keraguan yang panjang sebelum akhirnya bersedia memberikan kesaksian secara terbuka.³² Mereka khawatir akan menghadapi penolakan sosial, tekanan dari lingkungan, serta berbagai bentuk stigma yang mungkin muncul setelah kasus terungkap. Dalam beberapa situasi, korban merasa bahwa dirinya harus memiliki bukti yang sangat kuat agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban pembuktian secara sosial justru lebih banyak diletakkan pada korban dibandingkan pada figur yang memiliki posisi otoritatif. Akibatnya, korban tidak hanya menghadapi dampak psikologis dari kekerasan yang dialaminya, tetapi juga harus menghadapi tekanan sosial yang muncul ketika berusaha mencari keadilan.³³

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme perlindungan di lingkungan pesantren turut memperkuat proses pembungkaman tersebut. Pengurus pesantren mengakui bahwa pada saat peristiwa terjadi belum tersedia sistem pengaduan yang terstruktur maupun mekanisme perlindungan santri yang memadai. Kondisi ini menyebabkan korban tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Ketika saluran pengaduan tidak tersedia atau tidak dipercaya, korban cenderung memilih diam karena merasa tidak memiliki tempat yang mampu memberikan perlindungan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kekerasan simbolik tidak bekerja secara terpisah dari struktur kelembagaan. Sebaliknya, dominasi menjadi semakin kuat ketika tidak terdapat mekanisme institusional yang dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.³⁴

Dengan demikian, pembungkaman korban dalam kasus ini tidak dapat dipahami sebagai akibat dari kelemahan pribadi ataupun kurangnya keberanian individu. Pembungkaman merupakan hasil dari interaksi antara

³² Infroman Pendamping Korban, 'Hambatan Pengungkapan Kasus', 3 June 2026, Polres Trenggalek.

³³ Pendamping Korban.

³⁴ Pendamping Korban, 'Kondisi Korban'.

modal simbolik pelaku, legitimasi sosial yang dimilikinya, budaya penghormatan yang kuat dalam kehidupan pesantren, serta lemahnya sistem perlindungan kelembagaan. Keseluruhan faktor tersebut membentuk situasi yang membuat korban mengalami kesulitan untuk menolak, melawan, maupun melaporkan kekerasan yang dialaminya. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap santriwati tidak hanya melibatkan tindakan individual pelaku, tetapi juga berkaitan dengan struktur dominasi simbolik yang memungkinkan tindakan tersebut berlangsung dan bertahan dalam waktu yang relatif lama tanpa memperoleh perlawanan yang berarti.

Habitus Patriarkal dan Reproduksi Subordinasi Santriwati

Pembacaan terhadap realitas sosial yang berkembang di pesantren menunjukkan bahwa posisi rentan yang dialami santriwati terhadap kekerasan seksual terbentuk melalui proses yang kompleks, salah satunya melalui reproduksi habitus patriarkal yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Jika pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana modal simbolik kyai menghasilkan kepatuhan dan membentuk relasi kuasa yang tidak seimbang, maka bagian ini berupaya menjelaskan bagaimana struktur tersebut direproduksi dan diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh para aktor yang berada di dalamnya.³⁵ Dalam perspektif Pierre Bourdieu, habitus merupakan seperangkat disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang berlangsung secara terus-menerus dan kemudian memengaruhi cara individu memahami dunia sosialnya. Habitus tidak bekerja melalui aturan yang secara eksplisit dipaksakan, melainkan melalui kebiasaan, nilai, dan praktik yang diinternalisasi hingga tampak sebagai sesuatu yang alamiah. Karena itu, subordinasi perempuan sering kali tidak dikenali sebagai bentuk dominasi, melainkan diterima sebagai bagian normal dari kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, pesantren yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan struktur kepemimpinan yang berpusat pada figur laki-laki. Pengurus pesantren menjelaskan bahwa posisi pengambil keputusan utama berada di tangan kyai, sementara sebagian besar struktur pendukung juga didominasi oleh laki-laki. Meskipun terdapat keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas pendidikan dan pengelolaan santri putri, ruang pengambilan keputusan strategis tetap berada di bawah kendali figur laki-

³⁵ Jati Pamungkas and Mohamad Akmal Maulana Fitroh, 'Kontestasi Modal Simbolik Pesantren Di Arena Media', *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (April 2026): 119–30, <https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue2page119-130>.

laki.³⁶ Situasi ini menciptakan pengalaman sosial yang secara terus-menerus memperlihatkan bahwa otoritas, kepemimpinan, dan kewenangan identik dengan laki-laki. Dalam jangka panjang, pengalaman tersebut membentuk cara pandang santri mengenai siapa yang berhak memimpin dan siapa yang seharusnya mengikuti.

Temuan tersebut menjadi penting karena habitus patriarkal tidak lahir dari satu doktrin tunggal yang secara eksplisit mengajarkan inferioritas perempuan.³⁷ Sebaliknya, ia dibentuk melalui akumulasi pengalaman sehari-hari yang memperlihatkan distribusi kuasa yang tidak seimbang. Santriwati belajar memahami posisi sosialnya bukan hanya melalui pelajaran yang mereka terima di kelas, tetapi juga melalui pengamatan terhadap struktur kehidupan pesantren. Mereka melihat bahwa figur yang dihormati, didengar, dan memiliki otoritas tertinggi adalah laki-laki. Mereka juga menyaksikan bahwa keputusan-keputusan penting umumnya ditentukan oleh laki-laki. Pengalaman sosial yang berulang tersebut kemudian membentuk disposisi yang membuat dominasi laki-laki tampak sebagai sesuatu yang biasa dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Budaya ta'dzim yang menjadi salah satu fondasi pendidikan pesantren turut berperan dalam proses reproduksi habitus tersebut.³⁸ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penghormatan kepada guru merupakan nilai penting yang diajarkan dalam tradisi kepesantrenan. Akan tetapi, dalam praktik sosial tertentu, penghormatan tersebut dapat berkembang menjadi penerimaan terhadap relasi kuasa yang tidak setara. Korban menjelaskan bahwa sejak awal menjadi santri mereka diajarkan untuk menghormati, menaati, dan menjaga adab terhadap guru. Nilai tersebut pada dasarnya memiliki tujuan pendidikan yang positif. Namun ketika figur yang dihormati secara dominan adalah laki-laki yang juga memiliki otoritas kelembagaan dan keagamaan, maka penghormatan tersebut secara tidak langsung memperkuat penerimaan terhadap dominasi laki-laki dalam kehidupan pesantren.

Pendamping korban mengungkapkan bahwa salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi korban adalah posisi pelaku yang dipandang sebagai figur yang tidak mudah dipertanyakan. Menurutny, korban sering kali merasa

³⁶ Informan Pengurus Pondok, 'Mekasnisme Pengawasan', 3 June 2026, Polres Trenggalek.

³⁷ Moch. Hasan Hafani and Muhammad Nahidh Buldani, 'PATRIARKI DAN KEKUASAAN'.

³⁸ 'Ta'lim Muta'allim: Solutions for Forming the Ta'dzim Attitude of Generation Z Students towards Teachers | Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman'.

bahwa mereka tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk menolak atau mempertanyakan tindakan pelaku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa relasi yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia atau status pendidikan, tetapi juga oleh struktur gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan dalam menghadapi otoritas laki-laki. Dalam kondisi tersebut, habitus patriarkal berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat ketimpangan kuasa karena perempuan telah dibentuk untuk menghormati dan menerima otoritas yang berada di atasnya.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa reproduksi subordinasi perempuan tidak hanya berlangsung melalui hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga melalui respons sosial yang muncul setelah kasus terungkap.³⁹ Beberapa informan menceritakan bahwa terdapat kecenderungan sebagian masyarakat untuk mempertanyakan keputusan keluarga korban, lingkungan tempat korban berada, atau alasan korban tidak segera melapor. Meskipun tidak selalu disampaikan secara langsung kepada korban, cara pandang semacam ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus menjelaskan dirinya ketika terjadi kekerasan seksual. Sebaliknya, posisi pelaku yang memiliki otoritas sosial sering kali memperoleh perlindungan simbolik yang lebih besar. Pola tersebut menunjukkan bahwa subordinasi perempuan tidak hanya diproduksi oleh individu tertentu, tetapi juga direproduksi melalui cara masyarakat memahami dan merespons suatu peristiwa.

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, proses tersebut memperlihatkan bagaimana habitus patriarkal terus direproduksi melalui hubungan timbal balik antara struktur dan praktik sosial.⁴⁰ Struktur sosial yang didominasi laki-laki membentuk pengalaman sehari-hari para santri. Pengalaman tersebut kemudian menghasilkan disposisi yang mendorong individu menerima dominasi laki-laki sebagai sesuatu yang wajar. Disposisi tersebut selanjutnya diwujudkan kembali dalam praktik sosial yang memperkuat struktur yang sama. Dengan demikian, dominasi tidak memerlukan paksaan yang terus-menerus karena telah memperoleh legitimasi melalui kebiasaan dan pengalaman yang dianggap normal oleh para pelaku sosial.

³⁹ Informan Tokoh Masyarakat, 'Respons Terhadap Kasus', 3 June 2026, Polres Trenggalek.

⁴⁰ admin, *Habitus, Kapital, & Arena Pierre Bourdieu – KAJIAN BUDAYA & MEDIA*, n.d., accessed 3 June 2026, <https://kbm.pasca.ugm.ac.id/habitus-kapital-arena-pierre-bourdieu/>.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kerentanan santriwati terhadap kekerasan seksual tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui tindakan individual pelaku.⁴¹ Kerentanan tersebut berakar pada struktur sosial yang lebih luas yang secara terus-menerus mereproduksi ketimpangan relasi gender dalam kehidupan pesantren. Habitus patriarkal yang terbentuk melalui pola kepemimpinan laki-laki, budaya penghormatan terhadap otoritas, dan distribusi kuasa yang tidak seimbang menciptakan kondisi yang membuat perempuan lebih sulit melakukan perlawanan ketika menghadapi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks inilah subordinasi perempuan menjadi bagian dari realitas sosial yang terus direproduksi dan diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Dengan demikian, kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap santriwati tidak hanya menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh individu tertentu, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur patriarki bekerja melalui mekanisme yang halus dan sering kali tidak disadari. Habitus patriarkal menghasilkan disposisi yang membuat dominasi laki-laki diterima sebagai sesuatu yang normal, sementara perempuan ditempatkan pada posisi yang relatif kurang memiliki kuasa. Kondisi ini menjelaskan mengapa ketimpangan gender dapat bertahan dalam waktu yang panjang dan mengapa berbagai bentuk dominasi terhadap perempuan sering kali sulit dikenali sebagai masalah. Untuk memahami bagaimana kondisi tersebut memperoleh legitimasi sosial yang begitu kuat, perlu dianalisis lebih lanjut konsep *doxa* dan *misrecognition* yang menjadi mekanisme penting dalam reproduksi dominasi simbolik di lingkungan pesantren.

Doxa, Misrecognition, dan Normalisasi Kekerasan Seksual

Pembahasan mengenai otoritas simbolik kyai, pembungkaman korban, dan reproduksi habitus patriarkal menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap santriwati tidak dapat dijelaskan hanya melalui tindakan individual pelaku.⁴² Temuan penelitian justru memperlihatkan adanya struktur sosial yang memungkinkan relasi dominasi bertahan dan terus direproduksi dalam kehidupan pesantren. Untuk memahami bagaimana dominasi tersebut memperoleh legitimasi dan diterima sebagai sesuatu yang wajar, konsep *doxa* dan *misrecognition* yang dikembangkan Pierre Bourdieu menjadi penting untuk

⁴¹ Erda Ferly and Afrizal Tjoetra, 'Struktur Sosial Dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Habitus Dan Modal', *Journal of Social Transformation and Community Development* 1, no. 1 (April 2026): 31–38.

⁴² Ferly and Tjoetra.

digunakan.⁴³ Kedua konsep ini menjelaskan bagaimana suatu tatanan sosial dapat dipatuhi tanpa paksaan langsung karena telah diterima sebagai kebenaran yang tidak lagi dipersoalkan oleh para pelaku sosial. Dalam konteks penelitian ini, dominasi tidak hanya bekerja melalui posisi kyai sebagai pemegang otoritas, tetapi juga melalui keyakinan kolektif yang membuat otoritas tersebut dianggap alamiah dan sah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penghormatan kepada kyai merupakan nilai yang diterima secara luas oleh seluruh unsur pesantren. Pengurus pesantren menjelaskan bahwa hubungan antara santri dan kyai dibangun di atas prinsip ta'dzim, penghormatan, dan kepatuhan sebagai bagian dari proses pendidikan. Bahkan ukuran keberhasilan seorang santri tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademiknya, tetapi juga oleh sikap tawaduk kepada guru. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai tersebut tidak lagi dipandang sebagai pilihan moral yang dapat diperdebatkan, melainkan sebagai bagian dari identitas dasar seorang santri. Karena telah diterima secara luas dan diwariskan dari generasi ke generasi, penghormatan kepada kyai menjadi sesuatu yang dianggap normal serta tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut. Kondisi inilah yang oleh Bourdieu disebut sebagai *doxa*, yaitu seperangkat keyakinan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran sosial.

Dalam arena sosial pesantren, *doxa* tidak hanya berkaitan dengan penghormatan kepada guru, tetapi juga menyangkut cara memandang otoritas keagamaan secara umum.⁴⁴ Kyai diposisikan sebagai figur yang memiliki pengetahuan agama, pengalaman spiritual, kewibawaan moral, dan legitimasi sosial yang tinggi. Posisi tersebut membuat otoritas kyai sering kali berada di luar jangkauan kritik sehari-hari. Pengurus pesantren mengakui bahwa secara formal tidak terdapat larangan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda. Namun budaya penghormatan yang sangat kuat membuat kritik terhadap kyai menjadi sesuatu yang jarang dilakukan secara terbuka. Akibatnya, terdapat kecenderungan untuk menerima keputusan atau tindakan figur otoritas sebagai sesuatu yang sewajarnya. Dalam kondisi demikian, relasi kuasa yang tidak seimbang menjadi sulit dikenali karena telah menyatu dengan tata nilai yang dianggap benar oleh seluruh komunitas pesantren.

⁴³ Rizki Muhammad Iqbal, 'Pierre Bourdieu: Mekanisme Kekuasaan dalam Strukturalisme Genetik', *Lingkar Studi Filsafat Discourse*, 15 May 2023, <https://lsfdiscourse.org/pierre-bourdieu-mekanisme-kekuasaan-dalam-strukturalisme-genetik/>.

⁴⁴ Iqbal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *doxa* tersebut memiliki implikasi yang penting dalam kasus kekerasan seksual. Korban tidak hanya berhadapan dengan pelaku sebagai individu, tetapi juga berhadapan dengan sistem keyakinan sosial yang telah menempatkan pelaku dalam posisi yang sangat dihormati.⁴⁵ Ketika seseorang yang selama ini dipandang sebagai tokoh agama melakukan tindakan yang melanggar batas, korban mengalami kesulitan untuk menafsirkan pengalaman tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa korban mengaku sempat mengalami kebingungan dan keraguan ketika peristiwa itu terjadi. Mereka merasakan ketidaknyamanan, tetapi pada saat yang sama kesulitan memahami bagaimana figur yang selama ini dihormati dapat melakukan tindakan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa dominasi simbolik bekerja bahkan pada tingkat pemaknaan pengalaman korban sendiri.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan konsep *misrecognition* (*méconnaissance*), yaitu kondisi ketika relasi dominasi tidak dikenali sebagai dominasi karena tampil dalam bentuk yang dianggap sah dan wajar. Dalam penelitian ini, relasi kuasa antara kyai dan santriwati tidak selalu dipahami sebagai hubungan yang timpang karena dibungkus oleh bahasa penghormatan, adab, keteladanan, dan keberkahan ilmu. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya memiliki fungsi positif dalam pendidikan pesantren. Akan tetapi, ketika nilai tersebut tidak diimbangi oleh mekanisme kontrol dan akuntabilitas, ia dapat menjadi medium yang menyamarkan ketimpangan kuasa. Akibatnya, dominasi tidak tampak sebagai dominasi, melainkan hadir dalam bentuk relasi yang dianggap normal oleh mereka yang berada di dalamnya.

Proses *misrecognition* juga terlihat dalam respons sosial yang muncul setelah kasus mulai terungkap. Berdasarkan keterangan korban dan pendamping, salah satu ketakutan terbesar yang mereka hadapi adalah kemungkinan tidak dipercaya oleh masyarakat. Korban khawatir akan dianggap memfitnah tokoh agama, merusak nama baik pesantren, atau menciptakan kegaduhan sosial.⁴⁶ Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa legitimasi sosial yang melekat pada figur kyai tidak hanya memengaruhi

⁴⁵ 'Pierre Bourdieu Dan Pemikirannya Tentang Habitus, Doxa Dan Kekerasan Simbolik | PDF', accessed 9 June 2026, <https://www.slideshare.net/slideshow/academia-pierre-bourdieu-mei-2009/29492848>.

⁴⁶ 'Pierre Bourdieu Dan Pemikirannya Tentang Habitus, Doxa Dan Kekerasan Simbolik | PDF'.

hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat menilai suatu peristiwa. Dalam situasi demikian, kesaksian korban harus berhadapan dengan otoritas simbolik yang telah lama memperoleh pengakuan sosial. Akibatnya, korban sering kali merasa berada pada posisi yang lebih lemah bahkan sebelum proses pembuktian dimulai.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa normalisasi dominasi tidak berlangsung melalui tindakan represif yang terbuka, melainkan melalui proses sosial yang berjalan secara terus-menerus. Budaya ta'dzim, sentralitas kepemimpinan kyai, distribusi otoritas yang didominasi laki-laki, serta lemahnya ruang kritik terhadap figur otoritatif saling berinteraksi dalam membentuk realitas sosial pesantren. Karena dipraktikkan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari, seluruh elemen tersebut memperoleh status sebagai sesuatu yang wajar dan tidak lagi dipersoalkan. Pada titik inilah dominasi simbolik mencapai bentuknya yang paling efektif, yaitu ketika struktur yang menghasilkan ketimpangan diterima sebagai bagian normal dari kehidupan sosial.

Meskipun demikian, penting ditegaskan bahwa temuan penelitian ini tidak mengarah pada kesimpulan bahwa nilai-nilai pesantren merupakan penyebab langsung terjadinya kekerasan seksual. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat menjadi rentan disalahgunakan ketika bertemu dengan relasi kuasa yang tidak seimbang dan tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Penghormatan kepada guru, adab dalam menuntut ilmu, dan kepemimpinan keagamaan merupakan bagian penting dari tradisi pesantren yang memiliki fungsi pendidikan yang konstruktif. Persoalan muncul ketika legitimasi simbolik yang sangat besar tidak diimbangi oleh sistem perlindungan yang mampu mencegah penyalahgunaan otoritas.

Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap santriwati dalam kasus ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari dominasi simbolik yang bekerja melalui mekanisme doxa dan *misrecognition*.⁴⁷ Otoritas kyai yang didukung oleh modal simbolik yang besar menghasilkan kepatuhan santri, sementara habitus patriarkal mereproduksi penerimaan terhadap ketimpangan relasi gender. Pada saat yang sama, doxa mengenai penghormatan terhadap otoritas

⁴⁷ Zurmailis Zurmailis and Faruk Faruk, 'DOKSA, KEKERASAN SIMBOLIK DAN HABITUS YANG DITUMPANGI DALAM KONSTRUKSI KEBUDAYAAN DI DEWAN KESENIAN JAKARTA', *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra* 1, no. 1 (June 2017): 44–72, <https://doi.org/10.14421/ajbs.2017.01103>.

keagamaan dan proses *misrecognition* membuat relasi dominasi sulit dikenali sebagai bentuk ketidakadilan. Keseluruhan mekanisme tersebut membentuk struktur sosial yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi sekaligus menyulitkan korban untuk melakukan perlawanan. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan seksual di pesantren tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dengan cara suatu sistem sosial memproduksi, melegitimasi, dan mereproduksi relasi kuasa yang timpang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap santriwati di pesantren tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh individu tertentu, melainkan sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang bekerja dalam struktur sosial pesantren. Dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, penelitian ini menemukan bahwa dominasi terhadap santriwati terbentuk melalui akumulasi modal simbolik yang dimiliki kyai sebagai figur otoritatif, yang kemudian menghasilkan kekuasaan simbolik dan kepatuhan tanpa paksaan langsung. Otoritas tersebut memperoleh legitimasi melalui reputasi keagamaan, kewibawaan moral, serta budaya ta'dzim yang telah mengakar dalam kehidupan pesantren. Dalam situasi demikian, relasi antara kyai dan santri berkembang dalam posisi yang tidak sepenuhnya setara. Ketika kekuasaan simbolik tidak diimbangi oleh mekanisme akuntabilitas dan perlindungan yang memadai, relasi tersebut berpotensi melahirkan kekerasan simbolik yang membatasi kemampuan korban untuk menolak, melawan, atau melaporkan tindakan yang dialaminya. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan utama korban bukan terutama berasal dari ancaman fisik maupun keyakinan tentang konsekuensi religius, melainkan dari ketakutan tidak dipercaya, dianggap memfitnah tokoh agama, atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, kekerasan seksual dalam kasus ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga dengan struktur legitimasi yang melindungi otoritas dan membungkam suara korban.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa subordinasi perempuan direproduksi melalui habitus patriarkal yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari pesantren. Struktur kepemimpinan yang didominasi laki-laki, distribusi otoritas yang tidak seimbang, serta internalisasi nilai penghormatan kepada figur otoritatif membentuk disposisi yang membuat dominasi laki-laki tampak sebagai sesuatu yang alamiah. Proses tersebut diperkuat oleh

mekanisme *doxa* dan *misrecognition*, yaitu ketika relasi dominasi diterima sebagai kebenaran sosial dan gagal dikenali sebagai bentuk ketimpangan karena terselubung dalam bahasa adab, penghormatan, dan keberkahan ilmu. Akibatnya, ketimpangan relasi kuasa memperoleh legitimasi sosial yang kuat dan terus direproduksi dari waktu ke waktu. Temuan ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap santriwati merupakan hasil dari interaksi antara modal simbolik, kekuasaan simbolik, habitus patriarkal, serta lemahnya mekanisme perlindungan kelembagaan yang bekerja secara simultan dalam arena pesantren. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan seksual tidak cukup berfokus pada penghukuman pelaku semata, tetapi perlu diarahkan pada penguatan sistem perlindungan santri, pengembangan mekanisme pengawasan yang akuntabel, serta pembentukan budaya kelembagaan yang memungkinkan penghormatan terhadap otoritas berjalan beriringan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Daftar Pustaka

- admin. *Habitus, Kapital, & Arena Pierre Bourdieu – KAJIAN BUDAYA & MEDIA*. n.d. Accessed 13 July 2025. <https://kbm.pasca.ugm.ac.id/-habitus-kapital-arena-pierre-bourdieu/>.
- Baihaqi, M. Rifa, Halalah Amaliyah, Yuli Sri Awaliyah, Siska Permata Khoerunnisa, and Bayu Adi Laksono. 'Analisis Swot Kebijakan Pemerintahan Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren'. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 19, no. 2 (2023): 181–91. <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v19i2.591>.
- Bourdieu, Pierre. 'Habitus'. In *Habitus: A Sense of Place*, 2nd ed. Routledge, 2005.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE, 2013.
- Destyan H. Sujarwoko. 'Bapak-Anak Pengasuh Ponpes Yang Cabuli Santri Dituntut Maksimal - ANTARA News Jawa Timur'. Antara News. Accessed 6 June 2026. <https://jatim.antaranews.com/berita/-820447/bapak-anak-pengasuh-ponpes-yang-cabuli-santri-dituntut-maksimal>.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Cet. 8 rev. LP3ES, 2011. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971149384762836125>.

- Fatmawati, Nur Ika, and Ahmad Sholikin. 'Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik'. *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.52166/-madani.v12i1.3280>.
- Ferly, Erda, and Afrizal Tjoetra. 'Struktur Sosial Dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Habitus Dan Modal'. *Journal of Social Transformation and Community Development* 1, no. 1 (April 2026): 31–38.
- Haerussaleh, Haerussaleh, and Nuril Huda. 'Modal Sosial, Kultural, dan Simbolik Sebagai Representasi Pelanggengan Kekuasaan dalam Novel The President Karya Mohammad Sobary (Kajian Pierre Bourdieu)'. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua* 6, no. 1 (May 2021): 19–28. <https://doi.org/10.21107/metalingua.v6i1.10032>.
- Iqbal, Rizki Muhammad. 'Pierre Bourdieu: Mekanisme Kekuasaan dalam Strukturalisme Genetik'. *Lingkar Studi Filsafat Discourse*, 15 May 2023. <https://lsfdiscourse.org/pierre-bourdieu-mekanisme-kekuasaan-dalam-strukturalisme-genetik/>.
- Marhumah, Dr Ema. *KONSTRUKSI SOSIAL GENDER DI PESANTREN; Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan*. Lkis Pelangi Aksara, 2011.
- Moch. Hasan Hafani and Muhammad Nahidh Buldani. 'Patriarki dan Kekuasaan: Bagaimana Laki-Laki Mengendalikan Kehidupan dalam Keluarga'. *ASA* 7, no. 1 (February 2025): 1–12. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.120>.
- Ningtyas, Eka. *Pierre Bourdieu, Language And Symbolic Power*. III, no. 2 (2015): 154–57.
- Pamungkas, Jati, and Mohamad Akmal Maulana Fitroh. 'Kontestasi Modal Simbolik Pesantren Di Arena Media'. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (April 2026): 119–30. <https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue2page119-130>.
- Pebriaisyah, Bz Fitri, Wilodati Wilodati, and Siti Komariah. 'Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren'. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 1 (June 2022): 1–14. <https://doi.org/10.17509/-sosietas.v12i1.48063>.
- 'Pierre Bourdieu Dan Pemikirannya Tentang Habitus, Doxa Dan Kekerasan Simbolik | PDF'. Accessed 9 June 2026. <https://www.slideshare.net/slideshow/academia-pierre-bourdieu-mei-2009/29492848>.

- Syafiqurrahman, Syafiqurrahman, and Mohammad Hosnan. 'Kepemimpinan Kiai: (Analisis Modalitas Kepemimpinan Kiai Kampung Dalam Tradisi Kompolan)'. *Tafhim Al-'Ilmi* 10, no. 2 (May 2019): 17–41. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i2.3422>.
- 'Ta'lim Muta'allim: Solutions for Forming the Ta'dzim Attitude of Generation Z Students towards Teachers | Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman'. Accessed 6 June 2026. <https://pondokjurnal.uwj.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo/article/view/1334>.
- Walby, Sylvia. 'Theorising Patriarchy'. *Sociology* 23, no. 2 (May 1989): 213–34. <https://doi.org/10.1177/0038038589023002004>.
- Yamani, Ulfah Karimah, Wahyu Gunawan, and Muhammad Fedryansyah. 'Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Pada Anak Di Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung'. *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 3 (September 2023): 3. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1128>.
- Zahra, Roseta Al, and Rofi'ah. 'Hubungan Antara Pengalaman Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren Dan Tingkat Kepercayaan Santri Terhadap Lingkungan Belajar'. *DEWANTECH Jurnal Teknologi Pendidikan* 2, no. 1 (March 2024): 1. <https://doi.org/10.61434/-dewantech.v2i1.65>.
- Zurmailis, Zurmailis, and Faruk Faruk. 'Doksa, Kekerasan Simbolik Dan Habitus Yang Ditumpangi Dalam Konstruksi Kebudayaan Di Dewan Kesenian Jakarta'. *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra* 1, no. 1 (June 2017): 44–72. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2017.01103>.